

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

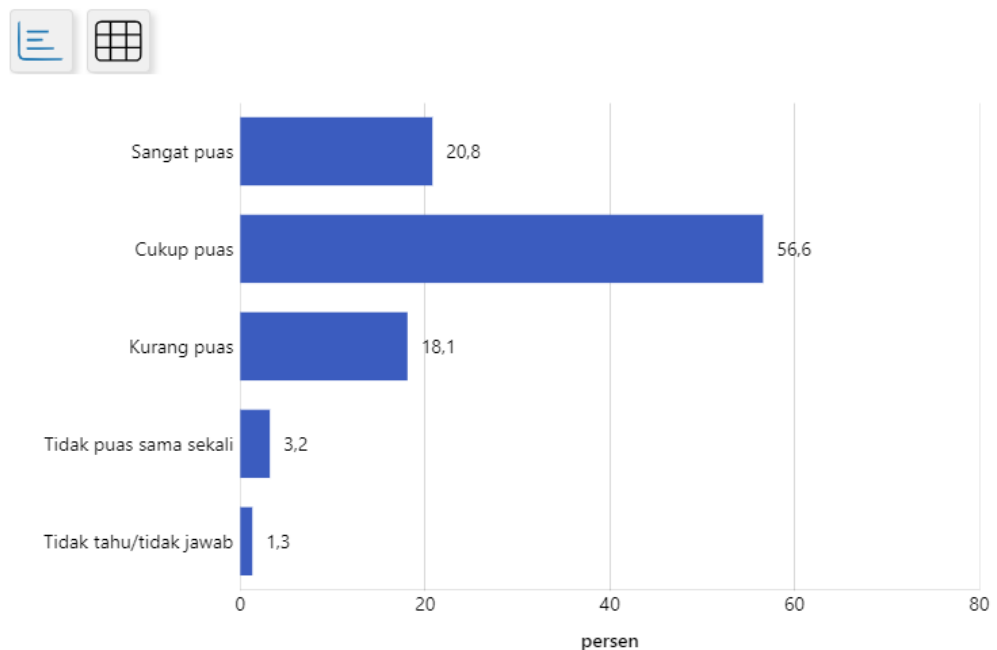
Penelitian ini mengkaji bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan mengenai “Pemakzulan Presiden Jokowi” pada portal berita Tempo.co. Isu pemakzulan terhadap presiden Jokowi ini muncul menjelang Pemilu 2024. Pemakzulan (Impeachment) sendiri berasal dari kata “makzul” yang berarti berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Merujuk dari KBBI, memakzulkan adalah menurunkan dari tahta atau memberhentikan dari jabatan. Di Indonesia, *impeachment* diartikan sebagai langkah untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) karena adanya pelanggaran hukum yang spesifik (Satriya, 2022). Pemberhentian presiden pernah dilakukan 2 kali di Indonesia, yaitu terhadap Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Soekarno diberhentikan oleh MPRS dikarenakan adanya indikasi keterlibatan Soekarno dengan peristiwa G-30 S/PKI. Sedangkan, Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR oleh keterlibatan sang Presiden dalam kasus *Bruneigate* dan Yanatera Bulog.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah menjabat selama 2 Periode, sejak tahun 2014. Beliau mengawali karirnya dalam politik sebagai Wali Kota Solo (2005), lalu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) sebelum akhirnya maju sebagai Presiden di tahun 2014. Presiden Jokowi terkenal sebagai Presiden

yang dekat dengan rakyat, sederhana, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dan reformasi dalam birokrasi. Hal ini membuat Presiden Jokowi sangat disayangi oleh rakyat terutama dianggap sebagai Presiden yang paling memperhatikan rakyat kecil. Pengaruh Presiden Jokowi dalam dunia politik juga meningkat. Namun seiring dengan itu, tentunya muncul banyak tantangan politik selama kepemimpinan beliau. Isu mengenai Pemakzulan Jokowi inipun termasuk menjadi salah satunya.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Jokowi menurut Polling Institute (Desember 2023)

 databoks



Gambar 1.1 : Tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi.

Sumber: Databoks

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul pertama kali ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirim surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 melalui akun Twitter-nya (Tempo.co, 2024). Surat tersebut memberikan saran untuk

menggunakan hak angket sebagai langkah awal dalam memulai proses pemakzulan atau *impeachment* terhadap Presiden Jokowi. Langkah ini diambil oleh Denny sebagai tanggapan terhadap pernyataan Jokowi yang menyiratkan keinginan untuk campur tangan dalam konteks Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Denny berpendapat bahwa campur tangan yang diinginkan oleh Kepala Negara menjelang Pilpres merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.



Gambar 1.2 : Pemberitaan Beberapa Media Terkait Isu Pemakzulan Jokowi

Isu pemakzulan Jokowi naik kembali di tahun 2024, setelah sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat sipil yang menyebut diri sebagai “Petisi 100, Penegak Daulat Rakyat” mengunjungi Menkopolhukam Mahfud Md. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. Mereka meminta Mahfud untuk memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024. Beberapa dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang dilaporkan di antaranya terkait dengan adanya nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK), intervensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Dewan Pengawas KPK melalui revisi Undang-Undang

KPK, penerbitan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang APBN yang seharusnya dibahas dan mendapat persetujuan DPR, dan menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan mengesampingkan perintah dari putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang inkonstitusional bersyarat (Detik News, 2024).

Berbagai pemberitaan tentang upaya dan wacana pemakzulan Presiden yang ada telah menjadi sumber polemik yang memicu beragam opini dari masyarakat. Polemik ini menyebabkan munculnya berbagai pendapat yang bertentangan. Sebagian masyarakat merasa bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah strategi pengalihan perhatian yang dilakukan untuk mendukung kandidat paslon lain, terutama karena hal ini dilakukan menjelang Pemilu 2024. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, melalui akun X nya (CNN Indonesia, 2024). Dukungan mengenai wacana pemakzulan juga banyak terutama terlihat dari gerakan demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebagai respon terhadap hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta pada 7 Februari 2024 lalu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam faktor yang membarengi kemunculan wacana ini adalah mengenai kemunduran pemerintahan Jokowi berupa penurunan demokrasi yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Penurunan demokrasi ini diindikasikan melalui kualitas Pemilu yang semakin menurun. V-Dem Institute (2024) melaporkan bahwa pemilu Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, telah dipengaruhi oleh sejumlah masalah, seperti manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, dan intervensi

pemerintah yang berlebihan dalam proses pemilihan (Febriandy & Wahid, 2024).

Media massa memainkan peran penting dalam menyediakan informasi terkini dan mendalam tentang isu pemakzulan serta implikasinya bagi pemerintahan dan masyarakat. Adanya isu pemakzulan presiden tentunya dapat menciptakan keadaan politik yang tidak stabil dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, media massa perlu terus memantau dan memberikan liputan yang akurat dan berimbang tentang perkembangan pemakzulan, termasuk alasan-alasan di baliknya, proses hukum yang terlibat, serta reaksi dan opini dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan media massa merupakan acuan bagi masyarakat dalam menilai suatu fenomena bahkan sosok atau individu tertentu. Melalui media massa, individu diberikan akses terhadap beragam informasi yang menjadi pijakan utama bagi mereka dalam membentuk pemahaman, apresiasi, dan justifikasi terhadap berbagai tindakan (Silvani et al., 2021).

Informasi yang disampaikan melalui media massa tidak hanya memengaruhi persepsi dan pandangan individu, tetapi juga memengaruhi langkah-langkah yang mereka ambil dalam kehidupan sehari-hari (Silvani et al., 2021). Politisi, pejabat pemerintah, dan tokoh militer secara luas dikenal di tengah masyarakat berkat dukungan dari media massa. Dengan bantuan media massa, para politisi bisa dipresentasikan dalam citra yang menguntungkan, yang membuat reputasi mereka meningkat dan mendapatkan dukungan serta simpati dari masyarakat. Namun, media massa juga memiliki potensi untuk

menghancurkan karier politik atau profesi seseorang melalui penulisan berita yang menciptakan citra negatif yang merugikan.

Meskipun media massa masih menjadi acuan bagi publik untuk menilai suatu fenomena, pembaca dalam hal ini juga memiliki kemampuan untuk secara bebas menciptakan makna dan bertindak sesuai interpretasi yang mereka buat terhadap teks media (Purnamasari, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya pembaca sebagai khalayak terlibat tidak secara pasif melainkan aktif dalam menentukan makna dari sebuah pesan media. Pesan media sendiri selalu terbuka dan polisemi (memiliki banyak arti) sehingga dapat diinterpretasikan berbeda tergantung konteks dan budaya penerima (khalayak). Fenomena ini menggambarkan bagaimana pemaknaan pesan media tidaklah statis, melainkan tergantung pada refleksi individu terhadap pesan yang diterimanya. Hal inilah yang coba dijelaskan dan ditelaah melalui analisis resepsi.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dengan masyarakat, dengan berbagai fungsi yang dijalankannya. Fungsi-fungsi tersebut termasuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi, dan sebagai kontrol sosial (Silvani et al., 2021). Dalam perannya sebagai kontrol sosial, media massa sebagai pers, dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Silvani et al., 2021). Dalam konteks ini, media massa berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan menjaga keseimbangan di antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini memastikan bahwa pers

senantiasa menjaga independensinya dan mempertahankan sikap yang netral terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada, sehingga dapat memberikan informasi yang objektif dan kritis kepada masyarakat.

Tempo merupakan salah satu media berita yang terkenal di Indonesia, menduduki posisi yang penting sebagai media oposisi. Dikenal dengan jurnalisme kritis dan investigatifnya, Tempo sering mengambil peran sebagai pengawas pemerintah dan penjaga kebebasan pers. Sejarahnya yang panjang, termasuk dua kali mengalami pembredelan selama era Orde Baru, mencerminkan betapa seringnya mereka menghadapi tekanan politik akibat pemberitaannya yang tidak kompromi terhadap kebenaran (Tempo.co, n.d.).

Dengan berkembangnya teknologi digital, Tempo bertransformasi menjadi portal berita yang dikenal dengan nama Tempo Interaktif, sebelum kemudian menjadi Tempo.co pada akhir 2011. Dengan berbagai inovasi ini, Tempo telah menjadi salah satu merek media yang dipercaya di Indonesia. Bahkan, menurut survei Reuters Institute yang berjudul Digital Report 2023, Tempo menempati peringkat keenam dari lima belas media massa *online*.

Tabel 1.1 : Media Terpercaya di Indonesia 2023

Sumber: Databoks

No.	Nama Media	Nilai
1	Kompas	69
2	CNN	68
3	TVRI	66
4	SCTV (Liputan6)	64
5	Detik.com	63
6	Tempo	60
7	TVOne	60
8	Berita TV Lokal	57
9	Tribun News	55

10	Jawa Pos	54
11	Merdeka.com	52
12	Sindonews.com	52
13	Kumparan.com	50
14	Suara.com	48
15	Tirto.id	44

Di mata masyarakat, Tempo dihormati atas keberaniannya mengangkat isu-isu yang menantang pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak demokratis. Namun, posisi mereka sebagai media oposisi juga membawa tantangan, termasuk kritik atas dugaan jurnalisme fitnah dan pemaparan opini yang tidak berdasar. Pada tahun 2022, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dan Salman menyoroiti objektivitas liputan Tempo.co terhadap Presiden Jokowi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Tempo.co mencapai tingkat ketidakberpihakan sebesar 51,03%, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penggabungan fakta dan opini, kesesuaian antara isi dan judul, serta penyajian dari berbagai sudut pandang. Meski demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa Tempo tetap memainkan peran kritis dalam menyajikan informasi kepada publik (Yunita & Salman, 2022).

Tempo telah menjadi salah satu pelopor dalam membawa isu-isu krusial ke ruang publik Indonesia. Dengan terus menghadirkan perspektif alternatif dan memperluas wacana, Tempo memainkan peran yang krusial dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan sikap kritisnya tersebut, tentunya dikhawatirkan akan mempengaruhinya dalam mengkontruksi suatu berita. Terutama dalam isu pemakzulan presiden Jokowi, Tempo.co ataupun media

berita lainnya tentunya akan memilih perspektif atau cara penyampaiannya masing-masing. Lalu dengan hasil konstruksi tersebut, tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung dari individu yang menerima. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis bagaimana penerimaan pembaca terhadap pemberitaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca tentang pemberitaan pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ataupun kegunaan dalam perkembangan penelitian dengan kajian komunikasi politik yang ada pada Program Studi Ilmu Komunikasi. UPN “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai penerimaan pembaca terhadap teks media terutama dalam ranah isu politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca Tempo.co terhadap pemberitaan mengenai isu pemakzulan presiden.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun rujukan bagi pembaca yang hendak mengetahui bagaimana penerimaan pembaca terhadap pemberitaan mengenai isu pemakzulan Presiden Jokowi pada portal berita *online* Tempo.co